

**PERSEPSI MASYARAKAT  
TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAN LSM DALAM  
PEMBERANTASAN *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN  
HUTAN TESSO NILO PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

**WAHYU ISKANDAR**

**04193029**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**





## ABSTRAK

Wahyu Iskandar, 04 193 029, *Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah dan LSM dalam Pemberantasan Illegal Logging di Kawasan Hutan Tesso Nilo Provinsi Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Januari-April, 2008, 170 halaman, 17 buku, 4 skripsi, 2 majalah, 1 koran, 4 buletin, 4 artikel internet.*

Penelitian ini melihat hubungan antara status sosial ekonomi (SSE) meliputi variabel pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan dengan persepsi masyarakat tentang peran Pemerintah dan LSM terhadap pemberantasan *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo Provinsi Riau. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep persepsi, konsep status sosial ekonomi, konsep *Illegal Logging*, konsep Pemerintah dan konsep LSM.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe eksplanatif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan program SPSS 15.00 dengan teknik pengujian hipotesis menggunakan teknik *chi square*.

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan, ditemukan data bahwa mayoritas responden menilai pemerintah lebih berperan dalam penanganan *Illegal Logging* dibandingkan dengan LSM. Akan tetapi peran Pemerintah dan LSM dinilai masih belum efektif, meskipun pemerintah telah membuat regulasi terkait dengan masalah kehutanan. Faktor yang menjadikan persepsi masyarakat terhadap peraturan pemerintah dinilai tidak efektif diakibatkan oleh tidak adanya sosialisasi, ketidakjelasan kebijakan, tidak adanya solusi dari kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk masyarakat dalam pemberantasan *Illegal Logging* dll. Pengetahuan responden terhadap keterlibatan LSM dalam pemberantasan *Illegal Logging* tidak diketahui responden secara mayoritas.

Hasil pengujian hipotesa memperlihatkan, dalam pembentukan persepsi mengenai peran pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo dipengaruhi atau berhubungan dengan tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan masyarakat, dan tingkat penghasilan masyarakat tidak ada hubungannya dalam hal ini, sedangkan dalam pembentukan persepsi mengenai peran LSM dalam pemberantasan *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo hanya dipengaruhi atau berhubungan dengan tingkat pekerjaan masyarakat, sedangkan tingkat pendidikan dan penghasilan tidak mempengaruhi persepsi masyarakat tentang peran LSM.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Posisi Indonesia yang terletak di kawasan beriklim tropis memberikan banyak keuntungan. Salah satunya yaitu hutan hujan tropis dengan keanekaragaman jenis tumbuhannya yang tersebar di hampir sebagian besar wilayah negara ini. Dalam tataran global, keanekaragaman hayati Indonesia ini menduduki posisi kedua setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan<sup>1</sup>. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan Indonesia, jumlah luas hutan yang terdapat di Indonesia pada tahun 2004 yaitu 126,8 juta hektar dan merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire.

Pada dasarnya hutan memiliki beberapa fungsi, sesuai dengan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. Nilai keanekaragaman hayati yang tinggi tidak menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada. Keberadaan hutan yang merupakan pendukung bagi kelangsungan hidup manusia, menyebabkan fungsi ekonomis hutan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan fungsi ekologis hutan. Padahal sebagai suatu kesatuan ekosistem yang kompleks dan dinamis, hendaknya dalam memanfaatkan berbagai hasil kekayaan hayati tersebut tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang terdapat di hutan. Negara sebagai pihak yang

---

<sup>1</sup> RENSTRA-KL Departemen kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan)



menguasai sumber daya alam hayati telah meminimalkan pengaruh negatif manusia terhadap alam dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan hasil sumber daya hayati.

Meskipun peraturan perundang-undangan mengenai masalah kehutanan ini telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah, namun realita dilapangan memperlihatkan masih banyak pihak-pihak yang mengabaikan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masalah kerusakan hutan yang terjadi di negara ini. Kondisi hutan Indonesia saat ini sudah semakin parah. Berbagai kerusakan yang terjadi pada hutan Indonesia saat ini menjadi sebuah catatan sejarah yang kelam bagi kelangsungan masa depan hutan di negara ini.

Permasalahan yang terjadi dalam bidang ini lebih banyak disebabkan oleh faktor kesengajaan, sebagai contohnya dapat kita lihat dalam permasalahan *Illegal logging*. Dalam permasalahan yang termasuk dalam kejahatan hutan ini (*forest crime*), para pelaku dengan sadar dan memahami betul bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum, namun walaupun demikian tidak jarang penduduk sekitar juga ikut terlibat dalam penjualan kayu hasil penebangan liar (*Illegal logging*). Kegiatan-kegiatan *Illegal logging* merupakan salah satu faktor utama penyebab berkurangnya kawasan hutan. Kegiatan produksi industri kehutanan menjadi salah satu faktornya. Tingginya tingkat produksi yang tidak sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh lembaga terkait

memberikan gambaran bagaimana kondisi hutan Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat percepatan pengurangan jumlah hutan (degradasi) di Indonesia tidak mengalami pengurangan namun menjadi semakin besar.

Pada tahun 2004 *proporsi kawasan hutan terhadap luas daratan* di Indonesia menyusut menjadi 63,04% jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 1993 yaitu sebesar 67,7% dan tahun 2001 sebesar 64,2%. Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terbesar dibanding negara ASEAN lainnya. Namun, bersama Filipina, Indonesia memiliki laju deforestasi yang tertinggi. Laju deforestasi yang pada periode 1985-1997 sebesar 1,6 juta hektar per tahun meningkat menjadi 2,1 juta hektar per tahun pada periode 1997-2001<sup>2</sup>.

Menteri kehutanan M.S Ka'ban mengatakan<sup>3</sup>, bahwa hutan nasional memiliki luas 120 juta hektar, dan menurut UU harus tetap dipertahankan tidak boleh kurang dari 30 persen. Tetapi, dengan mengkalkulasikan tingkat degradasi hutan Indonesia dari tahun ke tahun rata-rata 2,8 juta hektar pertahun, maka dalam waktu 25 tahun hutan tersebut dapat diprediksikan akan habis. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan World Bank;1986 bahwa "*dalam 40 tahun Indonesia akan menjadi tandus, dan faktor penyebab utamanya adalah praktek penebangan kayu (logging) tanpa perhatian*". Menhut lebih lanjut menyatakan setiap tahun negara dirugikan

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Situs <http://www.undp.or.id>, judul *Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup* pada tanggal 23 mei 2007

<sup>3</sup> Dinyatakan Pada Acara Seminar Peranan Anak Nagari Dalam Pelestarian Hutan 5 Agustus 2006

minimal Rp 30 triliun. Pada tahun 2004, dana yang masuk dari penebangan hutan hanya Rp 2,2 triliun. Perkiraan kerugian tersebut baru pada tingkat produksi rata-rata 30 m<sup>3</sup> per hektar, padahal hutan virgin produksinya rata-rata 150-200 m<sup>3</sup> per hektar.

Pada tahun 2000 lebih kurang 39 juta m<sup>3</sup> kayu yang ditebang di Indonesia adalah *Illegal*. Dimana angka tersebut sekaligus menggambarkan bahwa laju deforestasi pada tahun 2000 mencapai 1,85 juta hektar dengan kerugian nominal mencapai 47,01 trilyun rupiah. Sedangkan pada tahun 2003, Pemerintah Departemen Kehutanan memperkirakan kapasitas produksi industri kehutanan mencapai 73 juta m<sup>3</sup>. Sedangkan kemampuan hutan alam hanya mencapai 22 juta m<sup>3</sup> pertahun, dengan gambaran ini 36,4 juta m<sup>3</sup> kayu yang ditebang di Indonesia adalah illegal. Laju deforestasi di Indonesia pada tahun yang sama mencapai 1,825 juta hektar per tahun dengan kerugian nominal mencapai 43,680 trilyun rupiah. Pada tahun 2006, pasokan bahan baku mencapai 46,7 juta m<sup>3</sup> sedangkan kebutuhan industri mencapai 96,19 juta m<sup>3</sup>. Sekitar 30 juta m<sup>3</sup> kayu ditebang secara illegal sehingga menciptakan angka deforestasi sebesar 2,6 juta ha sesuai dengan data pada tabel di bawah<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> <http://rullysyumanda.wordpress.com/2007/10/20/deforestasi-dan-illegal-logging/> yang diakses pada 20 Okt 2007 18:21:29 GMT



## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Peran Pemerintah dan LSM dalam Pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, masyarakat mayoritas menyatakan pemerintah berperan dalam pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo, sedangkan LSM, mayoritas masyarakat memiliki persepsi bahwa LSM tidak berperan dalam pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo. Dalam pelaksanaan pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo, pemerintah lebih dominan bila dibandingkan dengan LSM, hal ini disebabkan mayoritas responden tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya LSM yang terlibat dalam pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo tersebut.

Dalam hal pemberantasan *Illegal logging* pemerintah telah melakukan regulasi terhadap tindakan *Illegal logging*, menjaga hutan dan hasilnya, dan pemerintah telah melaksanakan peraturan melalui kegiatan – kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun, masyarakat melihat kegiatan pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif. Faktor ketidakefektifan peraturan

pemerintah diakibatkan oleh tidak adanya sosialisasi, ketidakjelasan kebijakan, tidak adanya solusi dari kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk masyarakat dalam pemberantasan *Illegal logging* dll.

Terhadap peran LSM, mayoritas masyarakat tidak mengetahui ada atau tidaknya LSM yang terlibat dalam regulasi sebuah kebijakan dan hanya minoritas masyarakat yang mengetahui mengenai adanya LSM yang terlibat dalam pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo termasuk nama LSM yang terlibat. Dari LSM yang telah melakukan kegiatan dalam pemberantasan *Illegal logging* tersebut, dengan melakukan patroli, penangkapan dan lain-lain, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberantasan *Illegal logging* dan hanya diketahui oleh minoritas masyarakat sehingga menjadikan penilaian masyarakat bahwa mayoritas masyarakat memiliki persepsi LSM tidak berperan dalam pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo.

Dengan melihat status sosial ekonomi masyarakat yang terdiri dari variabel pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan tersebut bila dihubungkan dengan persepsi, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap peran pemerintah dalam pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo Provinsi Riau berhubungan dengan atau dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan masyarakat, sedangkan dalam pembentukan persepsi terhadap peran pemerintah tidak ada hubungannya dengan tingkat penghasilan masyarakat. Pada pembentukan persepsi mengenai peran LSM dalam pemberantasan



*Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo Provinsi Riau, persepsi masyarakat dipengaruhi atau berhubungan dengan tingkat pekerjaan masyarakat. Sedangkan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan tidak ada hubungannya dengan pembentukan persepsi masyarakat terhadap peran LSM dalam pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo Provinsi Riau.

Dengan melihat variabel dari Status Sosial Ekonomi (SSE) masyarakat yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan permasalahan persepsi masyarakat mengenai peran pemerintah dan LSM dalam pemberantasan *Illegal logging* di Kawasan Hutan Tesso Nilo Provinsi Riau dapat dikatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan *Illegal logging* itu hanya berpengaruh pada faktor pendidikan dan pekerjaan masyarakat, dan dari segi peran yang dilakukan LSM, faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam melihat peran yang dilakukan LSM dalam pemberantasan *Illegal logging* tersebut hanya variabel pekerjaan masyarakat.

## 7.2 Saran

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat mengenai pemberantasan *Illegal logging* dengan melihat peran pemerintah dan LSM dengan menitik beratkan penelitian pada salah satu peran baik itu pemerintah ataupun LSM dalam melakukan pemberantasan *Illegal logging* agar diperoleh sebuah hasil yang mendalam mengenai pertimbangan

MILIK  
UNIVERSITAS  
SIAKARAN  
INDALAS

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta; Kencana
- D, Rahmi Hidayati dkk. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestaian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutana*. Wana Aksara: Banten.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Gaffar, Afan. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Horton, B. Paul dan Chester, L.Hunt.1984. *Sosiologi Edisi Dua*. Erlangga: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. CV.Andi Offside: Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LP3ES.
- Sears, David O. Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau. 1999. *Psikologi Sosial*. Erlangga: Jakarta.
- Sunarto, Kamanto. 2004.*Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*.Fakultas Ekonomi UI: Jakarta.
- Surbakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Rajawali.
- Solihin, Dadang dan Putut Marhayudi. 2002. *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*. ISMEE: Jakarta.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta. PT Grafindo Persada.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.